

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

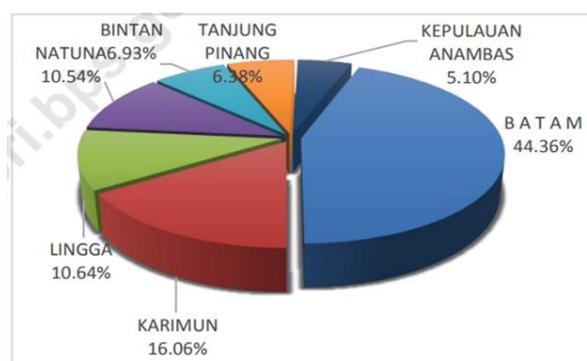
Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu per satu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dari berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan, karena cenderung bertahan (Departemen Koperasi, 2008).

Adapun alasan-alasan UMKM dapat bertahan dengan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena: pertama; sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua; sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapatkan modal dari bank. Implikasinya pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. Ketiga; dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya. Sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha berskala kecil. Akibatnya jumlah UMKM meningkat (Soejoedono, 2004)

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas. (Tambunan, 2002).

Fungsi dan peran UMKM di Indonesia cukup banyak baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi-sosial-politik misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta arus urbanisasi. Sekalipun, fungsi dan peran UMKM sangat penting namun, hingga saat ini belum ada definisi dan teori yang baku untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada pada UMKM di Indonesia. Sementara itu teori yang ada dari Barat dapat dipaksakan mentah-mentah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa ciri-ciri spesifik yaitu UMKM sebagai salah satu organisasi ekonomi/bisnis yang memiliki struktur sangat sederhana, sedikit aktivitas yang di formalkan, teknologinya sederhana, manajemennya lentur, sulit membedakan kekayaan pribadi dengan aset usahanya, administrasinya sederhana (bahkan sering tidak memiliki).

UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tumbuh subur di Kepulauan Riau. Berdasarkan survei UMKM 2017 tahunan terdapat 34,394 usaha/perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, 32,949 (95,8%) diantaranya adalah industri mikro dan sisanya adalah industri kecil. Modal minim, fleksibilitas dalam menjalankan usaha, produk/jasa yang dihasilkan dekat dengan kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya lokal menjadi ciri khas yang mendukung berkembangnya usaha ini.



Sumber : Kepri.bps.go.id (2017)

**Gambar 1.1** Persentase Banyaknya Usaha/Perusahaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota

Dari hasil UMKM tercatat bahwa usaha/perusahaan UMKM di Kota Batam sebanyak 15.258 (44,36 persen) atau hampir setengah dari total usaha/perusahaan

UMKM di provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menjadikan Kota Batam sebagai lokasi strategis pertumbuhan usaha/perusahaan UMKM. Selanjutnya, Kabupaten yang memiliki jumlah UMKM tertinggi kedua adalah karimun sebanyak 5.523 (16,06 persen), kabupaten Lingga sebanyak 3.659 (10,64 persen) Kabupaten Natuna sebanyak 3.626 (10,54 persen). Kabupaten Bintan sebanyak 2.382 (6,93 persen) dan kota Tanjung Pinang sebanyak 2.193 (6,38 persen). Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten termuda di Kepulauan Riau memiliki jumlah UMKM terendah sebanyak 1.753 (5,10 persen).

Pada Tahun 2018 jumlah UMKM meningkat menjadi 75.000 jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring banyaknya masyarakat yang membuka usaha imbas dari sulit mencari lapangan pekerjaan. Kepala Dinas UMKM kota Batam mensurvei bahwa jumlah pelaku UMKM mencapai 75.000. Sekitar 40.000 diantaranya merupakan pelaku usaha kuliner. Namun hanya 1.400 pelaku UMKM yang berada dalam binaan PMP-KUKM Kota Batam. Para pelaku usaha mikro dengan aset maksimum 50 Juta dan omset 300 juta setahun. (Preneur.id, 2018). Banyaknya usaha/perusahaan Industri mikro dan kecil menurut provinsi dan bentuk Badan Usaha. Perijinan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**

Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum Perijinan

Provinsi	Bentuk Badan Usaha/Badan Hukum/ Perijinan		
	PT	Koperasi	CV
Aceh	240	2.626	272
Sumatra Utara	184	742	421
Sumatra Barat	575	453	713
Riau	60	387	983
Jambi	-	-	253
Sumatra Selatan	-	1.061	193
Bengkulu	105	92	77
Lampung	-	131	119

Provinsi	Bentuk Badan Usaha/Badan Hukum/ Perijinan		
	PT	Koperasi	CV
Bangka Belitung	34	100	110
Kepulauan Riau	136	282	137
DKI Jakarta	616	220	891
Jawa Barat	1.586	2.713	2.158
Jawa Tengah	1.037	1.611	2.138
DI Yogyakarta	362	187	208
Jawa Timur	774	4.608	2.820

Sumber: bps.go.id

Dari Tabel di atas jumlah Badan Hukum/ Perijinan Pada Provinsi Kepulauan Riau PT Sebanyak 136, bentuk koperasi sebanyak 282 dan bentuk CV sebanyak 137. Dari keterangan tabel diatas Kepulauan Riau memiliki perijinan lebih banyak Koperasi dibandingkan dengan PT dan CV.

Badan Pengusaha (BP) Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas mereka mulai menaruh harapan pada sektor UMKM. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki para pelaku UMKM dapat menjadi motivasi untuk pertumbuhan ekonomi kepri khususnya Batam. Pertumbuhan ekonomi kepri pada triwulan kedua 2018 dari sisi pengeluaran ditopang oleh peningkatan kerja inverstasi sebesar 41.90 persen. Tapi di posisi kedua, konsumsi Rumah Tangga menyumbang andil sebanyak 39.57 persen. Sedangkan dari pertumbuhan kredit di Bank, UMKM di kepri termsuk stabil. Pada triwulan kedua 2018, kredit UMKM di kepri tumbuh sebesar 5.37 persen memang melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6.35 persen. Meskipun begitu, tingkat kredit macet atau *non performing loan* cenderung membaik. Pada triwulan kedua, *Non performing loan* membaik di angka 4.45 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6.35 persen

Secara sektoral, porsi terbesar penyaluran kredit UMKM diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi besar 46.49 persen. Diikuti oleh sektor konstruksi yang memiliki porsi besar 10.52 persen dari total kredit UMKM (Pos.co.id, 2018)

Pada tahun 2019 jumlah UMKM Batam meningkat lagi mencapai 81.486. Berdasarkan timesindonesia.co.id pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Batam diajak untuk memasarkan produknya secara daring atau online (Timesindonesia.go.id,2019). pengamat ekonomi digital Yudi Candra menjelaskan, hingga akhir tahun 2018 lalu, jumlah usaha mikro di Indonesia mencapai 58.91 juta dan usaha kecil 59.260. adapun jumlah usaha menengah mencapai 4.987. Akan tetapi, yang sudah go digital baru 5 persen. Sisanya masih sangat konvensional (Ekonomi.kompas.com, 2019). Hingga saat ini UMKM di Kota Batam yang tercatat sebanyak 81.575. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah UMKM di berbagai provinsi.

**Tabel 1.2**

Jumlah UMKM berdasarkan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten	Jumlah UMKM
1	Kab. Karimun	373
2	Kab. Bintan	1.107
3	Kab. Natuna	2.969
4	Kab. Lingga	3.052
5	Kab. Kepulauan Anambas	121
6	Kota Batam	81.575
7	Kota Tanjung Pinang	19.866

Sumber : <http://umkm.depkop.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat pada tahun 2020 kota Batam memiliki UMKM paling tertinggi di Kepulauan Riau yaitu sebesar 81.575. Kemudian disusul oleh Kota Tanjung Pinang memiliki jumlah UMKM 19.866. Jumlah UMKM terkecil berada pada kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah UMKM 121.

Berdasarkan pengelompokkan tenaga kerja, sebanyak 20.409 (59,34 persen) Usaha UMKM masuk dalam kelompok usaha dengan tenaga kerja berjumlah 1 (satu) orang. Dalam hal ini pemilik menjadi satu-satunya pekerja yang mengelola dan menjalankan sendiri usaha UMKM nya. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat

lebih dari setengah atau sebesar 53,85 persen pengusaha UMKM adalah perempuan.

Jumlah UMKM yang besar di Provinsi Kepulauan Riau tentunya akan berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap pengangguran. Berdasarkan data bulan Agustus 2017, pengangguran di Kepulauan Riau mencapai 7,16 persen, terbanyak pada kelompok tidak sekolah sebesar 14,61 persen diikuti oleh jurusan SMK yang mencapai 11,51 persen tabel (1.3). Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya disebabkan rendahnya keahlian *soft skill* lulusan SMK khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji. Pada dasarnya pendidikan kejuruan mempersiapkan individu untuk bekerja dalam waktu tertentu. Serta mampu dan mau bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Di samping itu, pendidikan kejuruan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian individu dalam berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian, lulusan SMK tidak hanya siap menjadi pekerja, namun juga siap memulai usaha.

**Tabel 1.3**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah dalam persen</b>
Tidak Tamat SD	1,53%
SD	5,53%
SMP	5,54%
Universitas	5,60%
SMA	7,12%
Akademi/Diploma	9,12%
SMK	11,51%
Tidak Sekolah	14,61%
Total	7,16%

Sumber : kepri.bps.go.id

Selain kelompok tidak sekolah dan SMK, dipengangguran juga banyak terjadi pada lulusan Akademi/Diploma yang berjumlah sekitar 9,12 persen dan

SMA sekitar 7,12 persen. Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMKM merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* tinggi. UMKM telah menyerap lebih 353 ribu tenaga kerja, atau lebih dari 50 persen tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau.

Penyerapan tenaga kerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau paling banyak terjadi pada usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, mencapai lebih dari sepertiga dari tenaga kerja pada UMKM secara keseluruhan (Tabel 1.4) sektor ini akan berkembang seiring peningkatan pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Peningkatan daya beli masyarakat akan mendorong pertumbuhan konsumsi dan permintaan akan barang, sehingga sektor ini yang pertama kali akan tumbuh. Selain itu, Sektor Perdagangan termasuk sektor yang mudah diusahakan karena dapat dilakukan dengan modal yang relatif kecil, sederhana, tidak memberikan keahlian khusus dan dapat dilakukan dalam skala usaha rumahan. Berpijak dari pendapat tersebut, usaha pada Sektor Perdagangan paling banyak dilakukan oleh para pelaku usaha yang baru mulai usaha. Sementara itu usaha pada Sektor Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum menepati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMKM.

Secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar 2 orang per usaha. Aktivitas konstruksi dan pendidikan memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu masing-masing sekitar 10 perkerja per usaha dan 9 pekerja per usaha. Kedua jenis aktivitas tersebut dapat dikatakan sebagai usaha yang padat tenaga kerja karena membutuhkan SDM yang banyak. Kegiatan konstruksi mencakup kegiatan konstruksi bangunan tempat tinggal, bangunan kantor, pertokoan, jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas olahraga, termasuk kegiatan penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung. Sedangkan jasa pendidikan mencakup penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah (negeri) maupun swasta.

**Tabel 1.4**

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Menurut Kategori

<b>Jenis Penyerapan Tenaga Kerja</b>	<b>Jumlah dalam Persentase</b>
Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.	32,06%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.	18,82 %
Jasa Perusahaan	11,85%
Industri Pengolahan	10,70%
Pendidikan	10,46%
Jasa Lainnya	4,14%
Konstruksi	3,51%
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3,09%
Pengangkutan dan Pergudangan	1,77%
Informasi dan Komunikasi	1,31%
Real Estate	1,01%
Pertambangan, Pengalihan, Listrik, dan Pengelolaan air.	0,78%
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0,50%

Sumber : bps.go.id

Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan nilai produksi industri manufaktur pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap nilai produksi industri manufaktur pada periode sebelumnya. Dari tabel 1.5 indeks produksi triwulan provinsi kepulauan riau tahunan 201,52 dapat diartikan bahwa indeks produksi tahunan kepulauan riau meningkat di setiap triwulan pertama dan seterusnya.

**Tabel 1.5**  
Indeks Produksi Triwulan

Provinsi	Indeks Produksi Triwulan menurut Provinsi 2019				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Aceh	178,24	188,15	188,41	188,80	185,90
Sumatra Utara	152,80	154,49	149,86	159,68	154,21
Sumatra Barat	131,90	119,61	128,59	122,50	124,53
Riau	136,61	133,78	130,39	136,74	134,38
Jambi	149,92	151,47	148,95	145,72	149,02
Sumatra Selatan	130,92	135,81	135,98	137,47	135,04
Bengkulu	164,75	164,93	165,85	159,53	163,76
Lampung	133,02	135,34	133,86	137,14	134,84
Bangka Belitung	118,61	112,78	111,64	111,83	113,72
Kepulauan Riau	191,32	199,46	207,31	208,00	201,52
DKI Jakarta	253,14	252,31	253,98	258,35	254,44
Jawa Barat	133,42	138,62	136,00	138,43	136,62
Jawa Tengah	137,35	139,36	138,84	138,13	136,42
DI Yogyakarta	164,58	159,68	162,49	163,77	162,63
Jawa Timur	168,97	180,04	175,79	173,32	174,53

Sumber : bps.go.id

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8 – 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 – 97,2 %. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,9% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak

56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu di utamakan. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia setiap tahunnya kredit pada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada tahun 2015 60-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15% dan pada akhir tahun 2018 sebesar 20%.

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM yaitu pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Kenyataannya, masih ada usaha yang tidak bisa memperoleh modal dari pihak luar baik bank maupun lembaga keuangan lain. Hal ini disebabkan dengan alasan, yaitu: tidak tahu prosedur, prosedur sulit, tidak ada agunan, suku bunga tinggi, usulan di tolak, atau alasan lainnya. Tabel 1.6, terlihat sebesar 43,4 persen UMKM tidak memperoleh kredit dari lembaga keuangan mengaku belum perlu untuk mengajukan kredit. Alasan lainnya yaitu belum berminat, takut berhutang, dan lain sebagainya. Sementara itu, alasan karena suku bunga tinggi hanya sekitar 15,89 persen.

**Tabel 1.6**

Persentase UMKM Menurut Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit Dari Lembaga Keuangan

<b>Jenis Alasan</b>	<b>Jumlah dalam persen</b>
Lainnya	48,07%
Suku Bunga Tinggi	15,89%
Tidak ada agunan	14,81%
Tidak Tahu prosedur	10,25%
Prosedur Sulit	8,55%
Usulan di tolak	2,43%

Sumber: bps.go.id

Usaha Mikro Kecil Menengah memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik di tinjau dari segi jumlah usaha (*establishment*) maupun segi penciptaan lapangan kerja (Akbar, M Taufiq, Mindarti, Lely Indah & Hadi, 2015). Dari segi penciptaan lapangan pekerjaan industri kecil ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar dengan menggunakan sumber daya lokal dan usahanya relatif fleksibel. Sedangkan ditinjau dari segi jumlah usaha (*establishment*), UMKM memainkan peran dinamis yang potensial dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, menyesuaikan dan bagi kelangsungan UMKM. Oleh karena itu, manajemen pengetahuan yang baik sangat diperlukan oleh UMKM.

Pertumbuhan dan profitabilitas UMKM bisa ditempuh jika penjualan itu sendiri bisa terjadi jika produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kualitas produk secara berkesinambungan untuk menunjang semua itu.

Para pemilik usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi agar pemilik usaha dapat menciptakan kinerja yang berkelanjutan. Menghadapi persaingan di pasar global, para UMKM harus dapat bersaing dengan basis teknologi, inovasi, kreatifitas dan imajinasi tidak hanya mengandalkan harga dan kualitas saja (Esti, Ratih Kusumaning, Suryani, 2008). Kinerja yang berkelanjutan dapat dicapai apabila pemilik usaha dapat melakukan inovasi secara terus-menerus sesuai dengan dinamika lingkungan (Miller, 2014). Pengembangan inovasi yang efektif, dengan segala keterbatasannya, para pemilik UMKM dituntut untuk mampu membangun jejaring kolaborasi yang baik dengan sumber daya yang memadai baik dibidang sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi. Kreatifitas dan inovasi sangat dibutuhkan oleh UMKM agar mereka mampu bersaing ditengah perkembangan lingkungan yang sangat cepat terutama dibidang teknologi. (Sutapa, 2014) menjelaskan bahwa peningkatan kinerja bagi pemilik usaha dapat dilakukan dengan membangun jejaring kolaborasi yang baik dan mengembangkan kapabilitas inovasi (kemasan, produk, pasar dan proses) yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pada Tabel 1.6, menunjukkan bahwa kendala akan adanya persaingan lebih menonjol di kota Batam sedangkan sebaliknya di kabupaten/kota selain Batam di

Kepulauan Riau justru masalah utama permodalan yang menjadi kendala utama dalam menjalankan usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa kota-kota besar adanya persaingan dari pengusaha lain yang merupakan kendala utama dalam berusaha, sedangkan di kota-kota kecil dan kabupaten justru masalah permodalan yang menjadi pokok permasalahan dalam berusaha.

**Tabel 1.7**  
Proporsi UMKM Yang Menyatakan Adanya Kendala Permodalan

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Adanya Pesaing</b>	<b>Permodalan/Likuiditas</b>
Karimun	51,32	66,42
Bintan	57,27	66,32
Natuna	43,07	71,75
Lingga	33,11	63,03
Kepulauan Anambas	59,86	65,63
Batam	68,47	55,62
Tanjung Pinang	53,65	56,84

Sumber : bps.go.id

Pelaku usaha dapat mengembangkan kemampuan inovasinya dengan cara berkolaborasi dengan pihak eksternal. (Kristian K moller, 2017) menyebutkan terdapat *strategic net* didalam kerja sama bisnis. *Strategic net* atau *strategic network* merupakan strategi yang melibatkan beberapa pihak termasuk pihak eksternal untuk menyetujui tujuan bersama serta menentukan peran masing - masing pihak didalam kerjasama bisnisnya. Maksud dari kolaborasi dengan pihak eksternal yaitu interaksi dengan pihak lain seperti pemasok, konsumen, kompetitor dan organisasi riset dengan tujuan untuk meningkatkan performa produk baru (Yi chen, Ethem Erkan Atakka, Jong-Kwan Woo, Khalil Najafi, 2018) Pelaku usaha atau perusahaan dapat meningkatkan kemampuan inovasi dengan bekerja sama dengan pihak tersebut. (Malte Brettel, 2011) mendefinisikan kolaborasi jaringan sebagai bagian dari sumber pengetahuan serta informasi yang tidak didapatkan dari dalam perusahaan. Kolaborasi yang dimaksudkan melibatkan pemasok, konsumen, pesaing, universitas dan *independent expert*.

Kolaborasi dengan pihak eksternal diperlukan agar dapat memperluas wawasan pelaku usaha dalam hal pengembangan produk baru (Yi chen, Ethem Erkan Atakka, Jong-Kwan Woo, Khalil Najafi, 2018) Informasi dari pihak eksternal yang digabungkan dengan riset internal tentu dapat menjadi salah satu senjata pelaku usaha untuk mendapatkan produk yang bernilai tinggi. Hasil dari kolaborasi yang berupa informasi tersebut juga berguna untuk bahan evaluasi jika ada sistem internal yang salah. Kolaborasi dengan pihak eksternal memang memiliki manfaat yang cukup baik. Namun, informasi yang didapatkan dari hasil kolaborasi perlu disaring agar dapat sesuai dengan kondisi usaha.

Berbagai informasi yang didapatkan perusahaan belum tentu semuanya dapat berpengaruh positif bagi kinerja bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan dalam mencari, memilah dan memahami informasi dari dalam maupun luar perusahaan atau yang disebut dengan *absorptive capacity* (Yi chen, Ethem Erkan Atakka, Jong-Kwan Woo, Khalil Najafi, 2018). (Chin-chung, 2009) beranggapan bahwa *absorptive capacity* merupakan kemampuan perusahaan untuk mengenali, memilah dan menerapkan informasi dari luar perusahaan. Hasil dari pengolahan informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. (Tu, 2006) menyebutkan bahwa *absorptive capacity* dianggap sebagai basis pengetahuan perusahaan untuk memindai lingkungan dan melancarkan proses komunikasi perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat *absorptive capacity* yang tinggi biasanya memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas sehingga dapat mengoptimalkan proses transfer informasi dengan pihak eksternal (Chin-chung, 2009). Semakin baik tingkat *absorptive capacity* perusahaan, semakin baik juga proses interaksi dengan pihak 4 eksternal yang nantinya akan berdampak positif bagi kemampuan inovasi. Maka dari itu perusahaan perlu meningkatkan *absorptive capacity* agar dapat memperoleh informasi yang tepat bagi kegiatan bisnisnya.

Beberapa penelitian bahwa penggunaan teknologi informasi akan memberikan manfaat kepada UMKM. (Idisemi apulu, 2011) berpendapat bahwa UMKM akan memiliki daya saing yang baik apabila dalam menjalankan aktivitas bisnisnya telah mengadopsi TI. Sedangkan (Subrahmanya ,M.H.B, 2011) juga

memiliki pendapat yang serupa bahwa UMKM yang memiliki TI akan memiliki kinerja yang jauh lebih baik di dibandingkan dengan UMKM yang tidak menggunakan TI.

Penelitian (Bandi, 2006) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi akan berdampak positif bagi perusahaan. Perusahaan akan memiliki kemudahan dalam memasuki pasar, melakukan penganekaragaman jenis produk yang dihasilkan, serta efisiensi biaya produksi. Dampak positif adanya TI pada perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan pada akhirnya. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan TI pada perusahaan merupakan langkah strategik yang akan membawa perusahaan pada profitabilitas yang semakin meningkat sehingga yang merupakan salah satu indikator kinerja keuangan.

(Arenius P,Sasi,V., 2006) menyatakan bahwa UMKM dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengembangkan kemampuan TI lebih besar lagi dan memahami kebutuhan pelanggan sehingga memungkinkan UMKM dapat bersaing secara internasional. Walaupun begitu sebagian besar UMKM beranggapan bahwa TI membutuhkan biaya yang relatif tinggi dengan kontribusi terhadap kinerja perusahaan yang kurang dapat terukur. Hal ini menyebabkan UMKM enggan untuk memanfaatkan TI dalam mendukung aktivitas bisnisnya. (Shidiq, 2018)

Studi sebelumnya meneliti tentang kemampuan perusahaan mana yang memungkinkan dalam kolaborasi eksternal dan selanjutnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini mengacu pada tesis RBV bahwa kemampuan dinamis adalah sumber keunggulan kompetitif.

Meskipun kolaborasi yang efektif juga meningkatkan kemampuan yang mendorong keunggulan kompetitif dalam industri. Studi ini tidak secara langsung menguji apakah dan bagaimana kolaborasi mengarah ke kemampuan dinamis yang lebih besar. Kolaborasi harus dikembangkan dalam penelitian masa depan. Ketiga kemampuan dapat berfungsi sebagai titik awal dari satu set yang lebih komperensif dari kemampuan memungkinkan atau sebagai komponen inti dari sebuah integratif kemampuan membangun kolaborasi, penelitian lebih lanjut tentang mengidentifikasi pengembangan kemampuan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *innovation capability, information capability external collaboration* pada *market performance* (Studi pada UMKM di Kota Batam)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Inovation Capability* berpengaruh terhadap *external collaboration* ?
2. Apakah *Information Capability* berpengaruh terhadap *external collaboration* ?
3. Apakah *External Collaboration* berpengaruh terhadap *market performance* ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh *Inovation Capability* terhadap *External Collaboration*
2. Pengaruh *Information Capability* terhadap *External Collaboration*
3. Pengaruh *External Collaboration* terhadap *Market Performance*

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan akademik maupun mahasiswa dalam perkembangan proses belajar mengajar

### **1.4.2. Bagi Peneliti**

1. Bertambahnya wawasan dan pengalaman menulis tentang *Inovation Capability, Information Capability* pada *Market Performance* dan hal lainnya berkaitan dengan skripsi ini.
2. Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi tingkat akhir Program Studi Manajemen di Universitas Universal.